

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang memiliki lautan yang lebih luas dari daratan. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat.<sup>1</sup> Secara fisik, dia punya panjang garis pantai mencapai 81.000 km dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.500 pulau.<sup>2</sup> Luas daratan 1,9 juta kilometer persegi, sementara luas perairan 3,1 juta kilometer persegi.<sup>3</sup> Luas wilayah laut termasuk didalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 5,8 km<sup>2</sup> atau sekitar  $\frac{3}{4}$  dari luas keseluruhan wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah perairan tiga kali luas seluruh wilayah daratan. Oleh karena itu negara Indonesia memiliki potensi perikanan yang tinggi, wilayah Indonesia letaknya sangat strategis ditinjau dari berbagai sudut pandang geologi, oceanografi, dan klimatologi. Dengan potensi demikian maka pembangunan kelautan di Indonesia dewasa ini diarahkan pada pendayagunaan sumberdaya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif secara serasi dan seimbang dengan

---

<sup>1</sup> Helena Thatcher Pakpahan, Richard W. E. Lumintang, dan Djoko Susanto, *Hubungan Motivasi Kerja Dengan Perilaku Nelayan Pada Usaha Perikanan Tangkap*, Jurnal Penyuluhan, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, Maret 2006), h. 13.

<sup>2</sup> Menurut data terakhir yang disurvei oleh LAPAN dan LIPI, jumlah pulau Indonesia sebanyak 18.110 pulau besar dan kecil. Pulau yang paling besar adalah Kalimantan yang luasnya mencapai 574.194 km<sup>2</sup> atau sekitar 30,43% dari seluruh luas Indonesia. Pulau terbesar kedua adalah pulau Sumatra dengan luas mencapai 480.647 km<sup>2</sup> atau 25,44% dari total luas Indonesia. Berikutnya berturut-turut adalah Maluku dan Papua 443.336 km<sup>2</sup> (23,44%); Sulawesi 191.671 km<sup>2</sup> (10,14%), Jawa 127.569 km<sup>2</sup> (6,7%); Bali dan Nusa Tenggara 73.173 km<sup>2</sup> (3,87%). Hal ini juga dijelaskan dalam bukunya Nikijulu, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: pusat pemberdayaan dan pembangunan Regional, 2002.

<sup>3</sup> Agung Haryoyudanto <http://www.kompasiana.com/wilayah-perairan-indonesia> (diupload 13 Februari 2017) h. 1

<sup>4</sup> Conyer d, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), hal. 56. Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia telah disetujui secara internasional untuk memperluas wilayah lautnya. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah ZEE diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

memperhatikan daya dukung kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.<sup>5</sup>

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013, wilayah laut dan pesisir Indonesia memiliki kekayaan ekosistem seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Sepanjang wilayah pesisir ini terdapat sumber daya hayati maupun non hayati, sumber daya buatan dan jasa lingkungan yang sangat berpotensi dan mendukung bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir khususnya, dan potensi perikanannya sangat besar.<sup>6</sup>

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, kondisi geografis Indonesia yang memiliki garis pantai panjang serta potensi kelautan, perikanan dan pesisir yang besar, pada dasarnya harus mampu memberi kontribusi signifikan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Besarnya potensi kekayaan ekosistem di tanah air yang melimpah tersebut, ternyata belum termanfaatkan secara optimal.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas, menerangkan kepada kita bahwa betapa besar potensi sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia, yang seharusnya berbanding lurus dengan masyarakat yang berada disekitarnya dan yang memanfaatkannya untuk kebutuhannya. Artinya para nelayan diharapkan memiliki kehidupan yang baik dan sejahtera, jauh dari nilai-nilai kemiskinan.

Sudah seharusnya kekayaan tersebut mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat nelayan. Namun menurut Direktur Jenderal Pesisir Pantai dan Pulau Kecil, salah satu permasalahan pesisir adalah kemiskinan yang berkepanjangan terutama di desa

---

<sup>5</sup> Lailatin Primyastanto dan Darmawan, *Analisis Bioekonomi Model Gordon Schaefer Sumberdaya Ikan Lemuru Di Perairan Selat Bali*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya. 2007) h. 62.

<sup>6</sup> Ainul Arif, *Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengolahan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rembang*, (Jakarta: tp 2010). h. 34

<sup>7</sup> Kepala badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan Zulficar Mochtar memperkirakan potensi jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan indonesia mencapai 12,5 juta ton. Ia meyakini data tersebut valid. "justru berdasarkan kajian intensif sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak mengarang," katanya saat ditemui di kementerian kelautan dan perikanan, jakarta pusat, senin, 19 juni 2017. KKP menghitung potensi sumber daya ikan dengan metode koleksi data dan proses analisis berdasarkan sains dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga diketahui potensi sumber daya ikan naik dari 9,93 juta ton pada 2015 menjadi 12,5 juta ton di 2016 [www.tempo.com](http://www.tempo.com), (13 Februari 2017.)

pesisir nelayan. Sebagai wilayah yang homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah sentra produksi ikan namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya tergolong di bawah garis kemiskinan.<sup>8</sup>

Akhmad Fauzi menyatakan bahwa nelayan Indonesia masih tergolong miskin dengan pendapatan per kapita per bulan sekitar US \$7-10.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah cara tangkap ikan yang masih menggunakan alat-alat tradisional, sehingga dengan alat yang tradisional ini nelayan sangat bergantung pada musim. Sehingga pada saat-saat tertentu nelayan terpaksa menganggur terutama pada musim hujan yang disertai dengan angin kencang yang menimbulkan gelombang laut yang relative besar yang tidak memungkinkan perahu-perahu kecil untuk menangkap ikan.<sup>10</sup>

Susilowati juga mengatakan bahwa nelayan tradisional pada umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan ciri-ciri yang melekat pada mereka yaitu suatu kondisi yang subsisten, dengan modal yang kecil, teknologi yang digunakan dan kemampuan serta perilaku yang tradisional baik dari segi keterampilan, psikologi dan mentalitas.<sup>11</sup>

Berdasarkan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2008) menyebutkan bahwa terdapat 2.135.152 rumah tangga pesisir, diantaranya 849.674 (39,79%) kategori rumah tangga pesisir miskin, 390.216 (18,27%) kategori rumah tangga pesisir sangat miskin dan 892.262 (41,79%) kategori rumah tangga pesisir hampir miskin.

---

<sup>8</sup> Dengan potensi yang demikian besar, kesejahteraan nelayan justru sangat minim dan identik dengan kemiskinan. Sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan. Data statistik menunjukkan bahwa upah riil harian yang diterima seorang buruh tani (termasuk buruh nelayan) hanya sebesar Rp. 30.449 per hari. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan upah nominal harian seorang buruh bangunan biasa (tukang bukan mandor) Rp.48.30,00 per hari. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini dikatakan oleh Tellisa Aulia. F. “*Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Dan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya*”. Draft laporan final hibah multidisiplin UI. 2009

<sup>9</sup> Akhmad Fauzi, “*Turning the Tide*” *Kebijakan Ekonomi Perikanan*, Kompas 30 Juli 2003 h. 35.

<sup>10</sup> Dewan Riset Sulawesi Utara, *Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Nelayan di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara*, (Pacipic Journal, Januari 2011).

<sup>11</sup> Indah Susilowati, “*Welfare Impact of Improved Boat Modernisation In Pemalang Regencies, Central Java, Indonesia*”, Master Thesis, (The Faculty of Economics and Management, University Putra Malaysia, 1991) h. 75

Kemiskinan nelayan, berakar pada tingginya aspek ketergantungan nelayan terhadap kegiatan usaha melaut dan keterampilan diversifikasi penangkapan nelayan yang masih rendah. Selain itu, kemiskinan nelayan juga disebabkan oleh sebab-sebab yang kompleks. Sebab sebab yang kompleks tersebut dikategorikan menjadi dua yaitu sebab yang bersifat internal dan eksternal yang saling berinteraksi dan saling melengkapi.<sup>12</sup>

Sebab-sebab kemiskinan nelayan tersebut antara lain: keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi laut dan gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi ke masa depan, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen, kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun sehingga akan mengganggu konsistensi perolehan pendapatan nelayan.<sup>13</sup>

Nelayan pada umumnya terdiri dari masyarakat yang pendidikannya relatif rendah.<sup>14</sup> Mereka bekerja pada juragan yang mempunyai kapal dan alat tangkap yang memadai untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Kegiatan ditentukan oleh alam dan lingkungannya. Kemampuan mereka dalam meningkatkan pendapatan, menghidupi keluarga serta membangun hari depan yang lebih baik sangat rendah. Mereka memiliki banyak kesulitan karena usaha

---

<sup>12</sup> Kusnadi, *Diversifikasi Pekerjaan di Kalangan Nelayan*. (Jakarta: Prisma, 2003) h. 12

<sup>13</sup> *Ibid*, 19.

<sup>14</sup> La Harudu Kadriani, *Persepsi Masyarakat Nelayan Tentang Pentingnya Pendidikan Formal Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali*, jurnal penelitian pendidikan geografi volume 1 no. 1 april 2017, dalam jurnal di sebutkan juga bahwa faktor penyebab utama rendahnya produktivitas adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang salah satunya ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal. Dari empat juta nelayan indonesia, 85% berpendidikan sekolah dasar (SD) atau buta huruf, 12% berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), 2,97% berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan 0,03% berpendidikan diploma (Dahuri, Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Lautan, IPB, Bogor, 2003) h. 80

penangkapan ikan yang mereka lakukan sangat bergantung pada alam dan lingkungan.

Sebahagian kecil golongan masyarakat nelayan yang kehidupannya makmur, seperti para nelayan yang memiliki alat tangkap yang canggih. Struktur masyarakat pesisir bawah nelayan memiliki kerawanan sosial yang tinggi disebabkan oleh dua hal. Pertama, masalah tekanan kemiskinan dan keterbatasan peluang kerja. Kedua, secara kultural (budaya) nelayan bersifat lebih terbuka dan temperamental karena masa-masa yang harus diwaspadai adalah ketika musim barat tiba.

Usaha penangkapan ikan dikenal dua musim, yaitu musim banyak ikan (musim timur) dan musim sedikit ikan (musim barat) yang lebih sering dikenal dengan musim paceklik. Bila musim ikan datang, mereka baru bisa berusaha, nelayan tidak perlu mengeluarkan energi yang banyak. Hanya dengan usaha yang relatif kecil, mereka sudah mendapatkan ikan, begitu sebaliknya jika musim sedikit ikan datang, kerja keras yang dilakukan hanya menghasilkan sedikit ikan.

Banyak yang tidak mampu melakukan penangkapan ikan, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil menangkap ikan. Terhadap kesulitan seperti itu, juragan memberikan bantuan barang-barang konsumsi (pangan) dengan perjanjian bahwa sebagian hasil tangkapan diserahkan kepada juragan sebagai pelunasan bantuan yang telah diberikan.<sup>15</sup>

Nelayan merasa ditolong dari kesulitan yang dihadapi. Mereka cenderung menyetujui pendapat juragan, sehingga di antara nelayan-juragan tumbuh sikap saling tergantung. Akan tetapi, bila musim tidak memungkinkan untuk melaut, nelayan harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendapatkan ikan, bahkan menunggu musim penangkapan ikan berikutnya dan hidup seadanya. Apabila musim penangkapan ikan belum tiba, nelayan berdiam diri di rumah dan menunggu musim berikutnya. Padahal, keluarga membutuhkan biaya untuk

---

<sup>15</sup> Helena Thatcher Pakpahan, Richard W. E. Lumintang Dan Djoko Susanto, *Hubungan Motivasi Kerja Dengan Perilaku Nelayan Pada Usaha Perikanan Tangkap*, Jurnal Penyuluhan, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006) h. 27

hidup. Akibatnya, mereka terdorong menjual barang yang dimiliki guna memenuhi tuntutan hidup.

Kehidupan miskin yang dialami sebagian besar nelayan di Indonesia menyebabkan “*bargaining position*” mereka sangat lemah. Mereka merasa “terisolasi”, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Secara sosial, mereka tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki modal sosial memadai untuk bersaing dengan nelayan-nelayan kapitalis atau nelayan-nelayan pengusaha perikanan.

Kalaupun ada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).<sup>16</sup> sebagai wadah, anggotanya tidak melibatkan para nelayan kecil, tetapi nelayan-nelayan kapitalis yang memiliki modal besar dan “*bargaining position*” tinggi dengan pemerintah atau berbagai stakeholders lainnya. Secara ekonomis pendapatan sangat kecil dan hanya mampu menghidupi keluarganya untuk sehari, sedangkan secara politik mereka tetap tertindas oleh struktur dan sistem politik state (negara) yang belum berorientasi pada masyarakat kalangan bawah.

Selama ini berbagai pendapat tentang nelayan telah berkembang dan sudah menjadi bagian dari perdebatan publik. Perdebatan yang telah berkembang antara lain menyangkut tentang masalah gaya hidup nelayan yaitu penggunaan uang atau pendapatan mereka yang pada masa panen ikan sering sekali membelanjakannya tanpa mempertimbangkan jika suatu saat musim ikan berakhir atau pada masa paceklik.

Dalam masyarakat konsumsi terdapat kecenderungan orang membeli barang bukan karena nilai kemanfaatannya, melainkan karena gaya hidup (*life*

---

<sup>16</sup> Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) secara nasional resmi berdiri pada tanggal 21 Mei 1973. Organisasi ini lahir dari pernyataan sikap secara bersama oleh enam organisasi nelayan sebelumnya, yakni; organisasi nelayan golkar, pengurus pusat sernemi, pengurus besar serikat nelayan islam indonesia, gerakan nelayan marhein, karyawan nelayan pancasila, dan dewan pimpinan pusat gensi. Sejak resmi berdiri, praktis tidak ada lagi organisasi nelayan selain HNSI. Secara politis, organisasi HNSI pada awalnya didorong atau lebih dikehendaki untuk melakukan proses dopolitisasi terhadap masyarakat nelayan yang sebelumnya terkotak-kotak dalam beberapa kelompok dengan orientasi kepentingan politik yang berbeda-beda. Setelah proses ini berhasil diprakarsai, dan HNSI terbentuk menjadi sebuah kekuatan yang menghimpun seluruh nelayan di indonesia, ternyata dalam perjalanannya hanya menjadi instrumen politik bagi kepentingan rezim orde baru. Sehingga eksistensi HNSI yang diharapkan dapat mengartikulasikan kepentingan nelayan, mengambil prakarsa untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah agar mengakomodir hukum adat dan memberikan hak-hak eksklusif kepada nelayan selama itu tidak pernah tercapai. (Asmarhi, Daud, Sekretaris DPD HNSI Kabupaten Langkat, 2017).

*style*), demi sebuah citra yang diarahkan dan dibentuk oleh iklan dan mode lewat televisi, tayangan sinetron, acara infotainment, dan berbagai media lainnya. Konsumsi dengan demikian jelas bukan sekedar pemenuhan kebutuhan fisik melainkan justru lebih utama adalah pemenuhan kebutuhan sosial berupa status sosial yang tinggi dengan memiliki barang-barang tertentu atau mengkonsumsi jasa mewah lainnya. Pada situasi seperti ini perilaku nelayan juragan yang demikian lebih bersifat konsumtif karena rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi tuntutan gengsi semata.<sup>17</sup>

Pendapatan rata-rata yang rendah tersebut menyebabkan nelayan menjadi miskin dan terbatas memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu dalam menyikapi paceklik, sebagian istri nelayan dengan terpaksa menjual segala barang rumah tangga yang dianggap berharga atau menggadaikannya ke lembaga-lembaga penggadaian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Pendapatan nelayan secara langsung maupun tidak langsung, akan sangat mempengaruhi pola konsumsi serta kesejahteraan hidup mereka.<sup>18</sup>

Dari data-data yang telah penulis kumpulkan dan dari kutipan-kutipan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan nelayan menjadi masyarakat yang berada digaris kemiskinan, diantaranya konsumsi<sup>19</sup> merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh setiap orang untuk bertahan hidup. Dalam ilmu ekonomi semua pengeluaran rumah tangga selain yang digunakan untuk tabungan dinamakan konsumsi. Selanjutnya konsumsi dapat menjadi satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sekaligus juga indikator kesejahteraan penduduk

---

<sup>17</sup> Bela Dwi Purwanti, *Gaya Hidup Masyarakat Nelayan*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, (Universitas Jember, 2013) h. 1

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>19</sup> Jika dijabarkan kedalam penjelasan ekonomi makro, maka konsumsi dapat diartikan sebagai variabel makro ekonomi yang dilambangkan dengan huruf "c" yaitu singkatan dari *consumption*. *Consumption* disini dikategorikan ke dalam klasifikasi konsumen rumah tangga, yaitu pembelanjaan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan pembelian berdasarkan pendapatan yang dimiliki atau diperoleh. Ketika kegiatan konsumsi itu tidak menghabiskan seluruh pendapatan yang dihasilkan, maka sisa uang yang dimiliki disebut sebagai tabungan. Tabungan ini dilambangkan dengan huruf "s" yaitu singkatan dari kata *saving* dalam bahasa inggris. Jika dilihat dalam perhitungan makro, maka perhitungan dari penjumlahan seluruh pengeluaran-pengeluaran belanja dan konsumsi masing-masing rumah tangga dalam cakupan satu negara disebut sebagai pengeluaran konsumsi masyarakat suatu negara. Pendapat Kadariah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. (Jakarta: Bina Aksara, 1996) h.113.

negara tersebut. Sebagai indikator kesejahteraan, tingkat konsumsi akan menentukan kualitas pembangunan manusia suatu negara.

Mankiw menjelaskan konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, kendaraan dan perlengkapan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkrit, termasuk pendidikan<sup>20</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya tersebut, maka seseorang harus dapat menentukan pola konsumsinya. pola konsumsi adalah proporsi atau jumlah pengeluaran yang digunakan seseorang dalam jangka waktu tertentu yang akan dipenuhi dengan penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan beberapa literatur yang telah peneliti telusuri, ada beberapa pola konsumsi yang berkembang di masyarakat. Pertama, terdapat beberapa teori yang di jelaskan oleh beberapa ahli ekonomi tentang pola konsumsi menentukan status atau kedudukan rumah tangga berdasarkan gambaran penghasilannya, yaitu:

1. Kadariah menyatakan bahwa pada umumnya golongan yang berpendapatan rendah mengeluarkan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan hidup yang mutlak seperti; pangan, perumahan dan sandang. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin kecil pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pokok<sup>21</sup>.
2. Delorme dan Ekulend menyatakan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi mempunyai kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) yang lebih kecil dari pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah<sup>22</sup>.
3. Pitomo menambahkan bahwa rumah tangga miskin pada umumnya mengeluarkan pendapatannya lebih besar untuk kebutuhan dasar, baik yang terdiri dari kebutuhan maupun konsumsi individu (makanan, pakaian,

---

<sup>20</sup> Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro, edisi ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 11.

<sup>21</sup> Kadariah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), h. 26

<sup>22</sup> C. D. Delorme And Ekulend, R.B, *Macroeconomics*, (Texas: PBI INC, 1993), h. 38



perumahan) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan).

**Tabel. 1.1**

**Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan, 2013-2014**

Kelompok Barang	2013		2014	
	Kurang dari Rp.999.999	Rp. 1.000.000 dan lebih	Kurang dari Rp. 999.999	Rp. 1.000.000 dan lebih
Makanan	Rp. 245.810,3	Rp. 709.625	Rp. 241.043,5	Rp. 732. 966
Bukan Makanan	Rp. 162.955,3	Rp. 1.146.389	Rp. 168. 726	Rp. 1.244.612
<b>Rata-rata Perkapita</b>	<b>RP. 703 561</b>		<b>Rp. 978 718</b>	

*Diolah Kembali dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I-2013, BPS. Sumber : Publikasi Statistik Indonesia*

Tabel diatas menjelaskan bahwa pengeluaran masyarakat Indonesia per bulan di tahun 2013 dan 2014 untuk konsumsi makanan dan bukan makanan menunjukkan bahwa, bagi masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp. 999.999 untuk konsumsi di dominasi dengan konsumsi makanan dibandingkan non makanan. Sebaliknya untuk masyarakat yang berpenghasilan 1000.000 dan lebih didominasi dengan konsumsi non makanan dibandingkan makanan. Kemudian konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makro agregat pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran konsumsi, sebagaimana yang terlihat pada tabel 1.1 dan semakin meningkat di 2014 dibandingkan dengan 2013.

Pola konsumsi kedua adalah berdasarkan pola penggunaannya, menurut Samuelson. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada dua keluarga yang menggunakan uang mereka dengan cara yang tepat sama<sup>23</sup>. Umumnya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan

<sup>23</sup> Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2002). h.

mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Modigliani menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi seseorang tersebut<sup>24</sup>. Di Indonesia pola konsumsi seseorang dapat mengindikasikan kedudukan seseorang dalam kelompoknya. Artinya, jika pola konsumsi seseorang terhadap barang dan jasa meningkat, hal itu dapat menggambarkan kedudukan seseorang dalam kelompoknya meningkat.

Dalam teorinya, Dusenberry menggunakan dua asumsi yaitu<sup>25</sup>:

1. Konsumsi seseorang akan tergantung dari penghasilan saat ini dan penghasilan tertinggi tahun sebelumnya (*Ratchet Effect*).

Dalam memahami pola konsumsi masyarakat yang dapat dipahami adalah bahwa konsumsi seseorang itu dipengaruhi oleh jumlah penghasilan seseorang. Namun tidak hanya faktor penghasilan saja, tetapi terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, walaupun secara teoritis menjelaskan pola konsumsi di dominasi pengaruh pendapatan tetapi secara realita terdapat faktor lain yang mempengaruhi pola konsumsi, sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.

2. Perilaku konsumsi seseorang akan tergantung pula dengan perilaku konsumsi lingkungannya. (*Demonstration Effect*).

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat bergantung pada lingkungan disekitarnya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan individu sangat terpengaruh dari lingkungan tempat individu itu berada, bisa jadi pengaruh sosial ekonomi, seperti gengsi, kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku. Sehingga walaupun itu sesuatu yang bukan menjadi sebuah kebutuhan tetapi mau tidak mau harus tetap dikonsumsi.

Para ahli ekonomi Islam juga berbicara mengenai konsumsi, tujuan dan juga faktor-faktor dalam mengkonsumsi. Menurut Monzer Kahf konsumsi adalah perilaku

---

<sup>24</sup> Algifari, Guritno Mangkoesobroto, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998), h. 66

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 72

seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan tatacara yang telah disyariat didalam Islam dalam rangka ibadah untuk mencapai kebahagiaan kehidupan didunia dan akhirat.<sup>26</sup>

Imam Shatibi mengatakan tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai *maslahah*, yang maknanya lebih luas dari sekadar *utility* atau kepuasan yang menjadi tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum *syara'* yang paling utama.

Menurut Imam Shatibi, *maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang kita konsumsi mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini<sup>27</sup>. Ada lima elemen dasar menurut beliau, yakni: kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut *maslahah*.

Yusuf Qardhawi<sup>28</sup> menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, di antaranya : konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik lagi halal, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Dengan demikian aktifitas konsumsi merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya. Sedangkan pada perspektif konvensional, aktifitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*).

Menurut Abdul Mannan bahwa konsumsi dalam Islam dikendalikan oleh lima prinsip<sup>29</sup>, yaitu:

---

<sup>26</sup> Z, Amanah, *Perilaku Konsumsi Islam Pemikiran Monzer Kahf*, (Surabaya: Uin Surabaya, 2014). Dr. Monzer Kahf dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka, konselor, dosen dan pakar syariah serta hukum-hukum islam di California Amerika Serikat.

<sup>27</sup> Setianingrum, *Islamic Economics Managemen Accounting. Maslahah Utility. Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Islam Dan Konvensional*, (Surabaya: PPs Unair, 2013) h. 21

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1995), h. 35

<sup>29</sup> Muh. Abdul Manan *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997), h. 81

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Kebersihan
3. Prinsip Kesederhanaan
4. Prinsip Kemurahan Hati
5. Prinsip Moralitas.

Pendapat lain mengatakan bahwa etika konsumsi menurut konsumsi menurut Islam<sup>30</sup> adalah, sebagai berikut:

1. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal

Al-Qur'an karim memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas dalam hal konsumsi, yaitu mendorong pengguna barang-barang yang halal lagi baik, dan bermanfaat, juga melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuali hanya yang baik. Pada dasarnya Al-Qur'an tidak menyebutkan satu-persatu barang yang boleh dikonsumsi, tetapi hanya diberi batasan bahwa yang dikonsumsi haruslah barang-barang yang halal, hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam melakukan konsumsi.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ  
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
١٥٧

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-A'raf : 157)<sup>31</sup>

2. Tidak melanggar batas-batas kewajaran dalam proses konsumsi

<sup>30</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau: 2007), h. 82-86

<sup>31</sup> Depag RI, *Al Qur'anul Kariim dan terjemahnya*. (Bandung: PT. Syamil Cipta Media.2009) h.170.

Batas-batas kewajaran dan kepantasan dalam Islam merujuk kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. Ath Thalaq : 7)<sup>32</sup>

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ  
فدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Artinya: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya” (QS. Al-Isra : 16).<sup>33</sup>

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ  
شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، -  
وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا - قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan benci untuk kalian tiga perkara: (1) Allah ridha untuk kalian agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. (2) Agar kalian seluruhnya berpegang teguh dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. (3) Hendaklah kalian saling memberikan nasehat kepada orang-orang yang mengurus urusan kalian (yakni penguasa kaum muslimin). Dan Allah benci untuk

---

<sup>32</sup> Ibid. h 559

<sup>33</sup> Ibid., h.283

*kalian tiga perkara: (1) Qiila wa Qaal (dikatakan dan katanya), (2) banyak meminta dan bertanya, dan (3) menyia-nyiakan harta." (HR. Muslim).*<sup>34</sup>

### 3. Tidak bermewah-mewahan dalam mengkonsumsi

Bermewah-mewahan yang dimaksud disini adalah pemakaian satu barang atau jasa diluar *kebutuhan* dan keperluan. Ekonomi Islam menilai bermewah-mewahan sebagai suatu cara yang tercela dalam konsumsi. Bermewah-mewahan akan menjadi sebab turunnya azab kemunduran, dan kehancuran suatu umat.

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan*” (QS. Alwaqiah : 45).<sup>35</sup>

### 4. Memperhatikan skala prioritas

Sistem ekonomi Islam menetapkan standar skala prioritas dalam mengkonsumsi yang harus di patuhi orang-orang Islam. Imam syathibi menjelaskan ada tiga skala prioritas kebutuhan manusia<sup>36</sup>.

#### a. *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyah* ialah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi demi kelangsungan kehidupan dan menciptakan *maqhasid syariah* sebagai berikut:

- 1) *Hifzhun nafs* (menjaga kelangsungan hidup)
- 2) *Hifzul 'Aql* (menjaga akal)
- 3) *Hifzud din* (menjaga agama)
- 4) *Hifzul nafs* (menjaga diri)
- 5) *Hifzul mal* (menjaga harta)

Konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok.

#### b. *Hajiyat*

---

<sup>34</sup> Sohih Bukhari Muslim, h. 1250

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 535

<sup>36</sup> Lajnah Min Asatidz Qism Fiqh Muqaran, *Qadaya Fiqhiyyah Muashirah*, (Cairo: al Azhar University, 2010), h 88

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia yang bisa hidup tanpanya, tetapi ketika kebutuhan itu tidak ada maka manusia akan hidup dalam, kesempitan dan kesulitan.

c. *Tahsinayat*

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga yang dipenuhi, setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah atau lux. Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat. Contoh kebutuhan tersier, yaitu pakaian mewah, tas mewah, mobil mewah, rumah mewah, dan kapal pesiar mewah.

Secara umum, tujuan manusia mengkonsumsi sesuatu yaitu:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 2) Mempertahankan status sosial
- 3) Mempertahankan status keturunan
- 4) Mendapatkan keseimbangan hidup
- 5) Memberikan bantuan kepada orang lain (tujuan sosial)
- 6) Menjaga keamanan dan kesehatan
- 7) Keindahan dan seni
- 8) Memuaskan batin
- 9) *Demonstration effect* (keinginan untuk meniru)

Dari beberapa paparan dari para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa, konsumsi adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan dapat diperoleh jika masyarakat dapat mengatur pola konsumsinya dengan baik dan benar. Kemudian yang juga dapat kita simpulkan dari penjelasan para ahli diatas bahwa pengeluaran konsumsi pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor bersifat kuantitatif dan kualitatif, maupun yang bersifat ekonomi dan non ekonomi. Dalam konteks nasional, konsumsi penduduk Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor non-ekonomi, terkhusus pada konsumsi masyarakat nelayan.

Namun masalahnya kemudian adalah disaat penghasilan berlimpah para nelayan menggunakan hasil pendapatannya untuk dibelanjakan tanpa

mempertimbangkan bagaimana nanti jika saat datang musim hujan dan angin kencang yang membuat para nelayan tidak bisa melaut atau mencari ikan. Inilah yang telah peneliti temukan pada pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di kabupaten Langkat. Pola konsumsi yang tidak baik ini membuat para nelayan mulai menjual kembali barang-barang yang telah dibeli dengan harga murah atau mereka terpaksa mengutang kepada tengkulak tempat mereka menjual ikan. Sebab walaupun mereka tidak memiliki pendapatan pada saat tidak bisa melaut, para nelayan tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Adapun jumlah kecamatan yang terdapat di kabupaten Langkat sebanyak 23 kecamatan dan 277 desa. Sedangkan penduduk kabupaten langkat yang berprofesi sebagai nelayan terdapat di 9 kecamatan, yaitu:

**Tabel. 1.2**  
**Kecamatan yang Memiliki Profesi Nelayan**  
**di Kabupaten Langkat 2016**

No.	Kecamatan	Nelayan Laut	Penangkap Ikan Sungai	Petani Ikan Tambak	Petani Ikan Kolam	Budidaya Mina Padi
1	Secanggang	4.228	98	442	18	-
2	Tanjung Pura	2.802	78	160	21	-
3	Gebang	1.488	78	270	20	-
4	Babalan	1.115	91	126	13	-
5	Sei. Lapan	2.220	58	26	15	-
6	Brandan Barat	2.137	56	116	15	-
7	Besitang	601	63	34	21	-
8	Pangkalan Susu	3.990	23	321	12	-
9	Pematang Jaya	671	55	15	12	-
	Jumlah	19.252	787	1.510	597	-

*Sumber: BPS Kab. Langkat 2016*

Sesuai dengan perkembangan zaman dimana kebutuhan hidup manusia semakin meningkat, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi



juga menyangkut kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya sejalan dengan peningkatan pendapatan. Di satu pihak, keluarga dengan pendapatan yang lebih dari cukup cenderung mengkonsumsi secara berlebihan. Sedangkan di pihak lain, masih banyak keluarga dengan pendapatan yang rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Oleh sebab itu peneliti ingin mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi nelayan muslim di kabupaten langkat untuk meningkatkan taraf hidupnya yang sejalan dengan pola konsumsinya, karena pola konsumsi mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya pengeluaran konsumsi pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor bersifat kuantitatif dan kualitatif, maupun yang bersifat ekonomi dan non ekonomi. Dalam konteks nasional, konsumsi penduduk Indonesia, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor non-ekonomi. Sehingga menurut peneliti terdapat beberapa faktor yang sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan di kabupaten langkat. Seperti, faktor pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan formal, adat istiadat (kebudayaan), dan nilai-nilai agama.

Faktor pendapatan, sebagaimana menurut Engel yang menyatakan bahwa pada saat pendapatan masyarakat seseorang meningkat, maka proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk membeli makanan semakin berkurang, bahkan jika pengeluaran aktual untuk makanan itu sendiri meningkat. Sehingga faktor pendapatan memiliki pengaruh terhadap pergeseran pola konsumsi suatu rumah tangga.<sup>37</sup>

Dari penelitian awal yang penulis lakukan, terbukti bahwa pendapatan nelayan di kabupaten langkat sangat fluktuatif. Walaupun terkadang disaat cuaca dan tinggi air laut yang baik nelayan bisa mendapatkan tangkapan atau hasil laut yang banyak tetapi itu bisa terjadi hanya dalam satu atau dua minggu dalam sebulan. Hal ini membuat pendapatan tidak menentu yang apabila para nelayan tidak bisa mengelola pola konsumsinya dengan baik maka akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil wawancara awal penulis dengan para nelayan di Kabupaten Langkat ternyata saat sekarang ini hasil tangkap nelayan terus mengalami penurunan , selain

---

<sup>37</sup> James F. Engel & Roger D. Blackwell & Paul W. Miniard, *Perilaku Konsumen*. Jilid I, Edisi 6, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994) h. 106.

faktor kurangnya modal seperti alat tangkap dan perahu yang sederhana, menurun hasil tangkap di sebabkan juga oleh jumlah ikan yang terus berkurang. Selain disebabkan oleh penangkapan yang membabi buta, hal ini juga disebabkan oleh berkurangnya hutan-hutan bakau yang berubah fungsi menjadi kebun sawit sehingga sarang dan tempat ikan mencari makan terus berkurang.

Selain faktor pendapatan, ukuran keluarga juga mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Dari hasil Survey Biaya Hidup (SBH) membuktikan bahwa semakin besar jumlah keluarga maka semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan daripada untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Hal ini berarti bahwa semakin kecil ukuran keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan. Selebihnya, keluarga akan mengalokasikan sisa pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Oleh sebab itu besar kecilnya jumlah keluarga dianggap akan mempengaruhi pola konsumsinya.

Pengamatan penulis mendapati jumlah anggota keluarga para nelayan kabupaten Langkat dapat dikatakan banyak, hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor makanan yang dikonsumsi, seperti makanan laut (*Seefood*) dan juga pengetahuan tentang keluarga berencana masih sangat minim bahkan mereka sangat tidak mau mengikuti program keluarga berencana (KB). Pemahaman mereka semangkin banyak anak maka semangkin banyak rezeki hal ini adalah pemahaman yang diturunkan oleh orang tua mereka. Maka semangkin banyak anggota keluarga menuntun para nelayan untuk memperbaiki pola konsumsinya.

Faktor selanjutnya adalah tingkat pendidikan formal, dimana tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya. Seperti yang dijelaskan Sumarwan, dimana tingkat pendidikan formal kepala rumah tangga juga berpengaruh terhadap pola konsumsi rumah tangga<sup>38</sup>. Berdasarkan data dari Badan Statistik kabupaten Langkat, Jumlah pencari kerja di kabupaten Langkat berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu:

**Tabel. 1.3**  
**Ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

---

<sup>38</sup> Sumarwan, *Keluarga Masa Depan Dan Perubahan Pola Konsumsi*, (Jakarta: Warta Demografi LD. FEUI, 1993), h. 74

1	SD	159.694
2	SLTP	106.109
3	SLTA	80.222
4	SMK	40.912
5	D1/D2/D3	40.912
6	Sarjana Lengkap	7.599

*Sumber: BPS Kab. Langkat 2016*

Berdasarkan data wawancara awal yang dilakukan peneliti, jenjang pendidikan nelayan di kabupaten langkat, rata-rata pada jenjang pendidikan SD-SLTP.<sup>39</sup> Hal ini dapat memberikan gambaran bagaimana pola konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan di kabupaten langkat.

Faktor adat istiadat (kebudayaan), dimana budaya konsumsi merupakan bentuk dari hubungan antara budaya dan konsumsi. Hubungan tersebut saling mempengaruhi, yaitu budaya dapat mempengaruhi konsumsi, begitu juga sebaliknya, konsumsi dapat mempengaruhi budaya. Sebagaimana yang disampaikan James F. Engel dalam bukunya yang berjudul “perilaku konsumen” membagi 3 jenis pengaruh budaya terhadap pola konsumsi, yaitu; pengaruh budaya terhadap struktur konsumsi, pengaruh budaya terhadap pemaknaan sebuah produk, dan pengaruh budaya terhadap pengambilan keputusan individu<sup>40</sup>. Misalnya, budaya konsumtif yang mendarah daging khususnya di Indonesia pada saat ini bisa jadi merupakan dampak jangka panjang dari kebiasaan-kebiasaan hedonistik yang dimiliki oleh generasi sebelum berupa kebiasaan dengan tidak melihat keadaan sendiri. Seperti budaya pulang kampung atau hari raya yang harus membawa barang-barang mewah dan banyak, untuk di tujukkan kesanak saudara.

Terutama bagi para nelayan di kabupaten langkat, banyak sekali budaya-budaya yang menjurus kepada sifat-sifat konsumtif. Contohnya berlomba-lomba dalam membeli barang rumah tangga, juga melihat tetangga membeli sepeda motor baru, maka tetangga yang lain akan berusaha membeli sepeda motor juga, walaupun dengan secara kredit atau meminjam kepada agen tempat mereka menjual ikannya.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyono sebagai sekertaris BAPPEDA Kabupaten Langkat pada tanggal 25 Januari 2017.

<sup>40</sup> James F. Engel&Roger D. Blackwell & Paul W. Miniard. *Perilaku Konsumen*. Jilid I, Edisi 6, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), h. 87

Kebiasaan untuk memasak atau memakan makanan yang enak-enak juga telah menjadi kebudayaan nelayan di kabupaten Langkat. Ada sebuah pepatah yang menguatkan pernyataan diatas, seperti yang selalu mereka katakan “Biar rumah condong yang penting gulai lomak”. Artinya walaupun seseorang itu pendapatan sedikit dan termasuk dari orang miskin itu tidak begitu perlu diperbaiki yang penting makanan harus tetap enak. Pribahasa diatas juga membuktikan bahwa budaya nelayan di kabupaten Langkat sangat menjerus kepada nilai-nilai konsumtif.

Sebagai penduduk yang mayoritas muslim, nilai-nilai agama juga akan dapat mempengaruhi dari pada pola konsumsi rumah tangga karena pola konsumsi yang boros, tidak ada perencanaan dan juga nilai-nilai keagamaan yang mengharuskan kita harus hidup sehat dan berkah dan tidak berlebihan dalam pola konsumsi kita.

Survey awal membuktikan bahwa nilai-nilai agama Islam sangat berakar di setiap desa nelayan di kabupaten Langkat. Hal ini terbukti dari sholat lima waktu selalu dikerjakan di mesjid, dan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan seperti maulid nabi, Isra’ mi’raj, wirit yasin, pengajian rutin dan ritual-ritual keagamaan lainnya selalu dilakukan. Peneliti juga banyak melihat para nelayan ini masuk dalam kelompok keagamaan seperti majelis taklim dan persulukan yang selalu mengajarkan nilai-nilai agama Islam.

Secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat atau lebih khusus yang dihadapi rumah tangga nelayan muslim di Kabupaten Langkat adalah bersumber dari jumlah keinginan yang tidak terbatas. Biasanya manusia merasa tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh dengan tidak melihat kemampuan yang mereka miliki. Apabila keinginan dan kebutuhan masa lalu sudah dipenuhi maka keinginan yang baru akan muncul. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis mengadakan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam proposal disertasi dengan judul : **“Analisis Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan Muslim di Kabupaten Langkat”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim. Sehingga menurut peneliti dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Dalam konteks nasional, konsumsi penduduk Indonesia, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor non-ekonomi.
2. Penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan pembangunan manusia di kabupaten Langkat memungkinkan pergeseran pada pola konsumsi masyarakat, yang tidak diimbangi dengan pemerataan penghasilan di sebagian masyarakat di kabupaten Langkat.
3. Daya beli masyarakat yang meningkat, menyebabkan perilaku hidup masyarakat yang hedonis, tanpa disertai dengan penstabilan pendapatan dan pengeluaran.
4. Berbagai faktor yang mempengaruhi pola konsumsi yang dapat menggambarkan kegiatan konsumsi masyarakat yang dianggap dapat mendorong penurunan tingkat kesejahteraan dan bentuk penanggulangannya.
5. Pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di kabupaten Langkat yang pendapatannya tidak pasti jumlahnya, disertai dengan pola konsumsi yang tidak sesuai.

### **C. Batasan Masalah**

Pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di kabupaten Langkat berhubungan dengan perilaku individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhannya dengan kondisi lingkungan masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan muslim di kabupaten Langkat, tidak menjadi penghalang untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal dan kreatif sehingga memberikan keuntungan secara ekonomis. Dalam kegiatan penelitian ini, permasalahan akan dibatasi pada :

1. Pola konsumsi yang dimaksud adalah susunan tingkat kebutuhan seseorang atau rumah tangga untuk jangka waktu tertentu yang akan dipenuhi dari besaran pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan formal, adat istiadat atau budaya, dan nilai-nilai agama atau religi.
2. Perbedaan pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di kabupaten Langkat.

3. Strategi penanggulangan pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di Kabupaten Langkat.
4. Nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nelayan penuh, artinya pekerjaan nelayan memang menjadi satu-satunya pekerjaan yang dilakoni dan nelayan perorangan yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah seperti tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di kabupaten Langkat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di kabupaten Langkat?
3. Apakah terdapat perbedaan pola konsumsi rumah tangga nelayan di Kabupaten Langkat ?
4. Bagaimanakah strategi penanggulangan pola konsumsi yang baik pada rumah tangga nelayan muslim di Kabupaten Langkat ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di kabupaten Langkat?
2. Untuk menganalisis faktor-faktor (pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan formal, budaya, dan religi) yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di kabupaten Langkat.
3. Untuk menganalisis perbedaan pola konsumsi rumah tangga nelayan muslim di Kabupaten Langkat.

4. Untuk menjelaskan strategi penanggulangan pola konsumsi yang baik pada rumah tangga muslim di Kabupaten Langkat

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, terutama mengembangkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi.